



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Telepon : 0736-51276

JURNAL PERKULIAHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 2023 GENAP

MATA KULIAH : Peradilan Agama di Indonesia

NAMA DOSEN : Dr ROHMADI, MA

KREDIT/SKS : 2 SKS

KELAS : 2A

| TATAP MUKA KE | HARI/TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | STATUS | RENCANA MATERI | REALISASI MATERI | KEHADIRAN MHS | PENGAJAR | TANDA TANGAN |
|---------------|--------------------------|-------|---------|-------|---------|---|--|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Selasa, 20 Februari 2024 | 10.01 | 11:40 | B4.A | Dimulai | Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Di Indonesia | Pengertian Pengadilan Dan Peradilan,Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Dasar Hukum Pengadilan Agama Di Indonesia | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 2 | Selasa, 27 Februari 2024 | 10.01 | 10:40 | B4.B | Dimulai | Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Di Indonesia | Ckupan Pengadila Agama Di Indonesia, Metode Pengkajian Peradilan Agama Di Indonesia, Kegunaan Studi Peradilan Agama Di Indonesia, Hubungan PA dengan Bidang- bidang Lainnya, Hubungan PA dengan Penerapan Hukum Di Indonesia | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 3 | Selasa, 5 Maret 2024 | 10.01 | 11.40 | B4.A | Dimulai | Pengadilan Agama sebagai salah satu Pranata Hukum. | Penerapan Hukum Islam Lewat jalur Infra struktur, Penerapan Hukum Islam Leawat Jalur Supra Stuktur, Pengadilan Agama Pada masa Penjajahan Belanda dan Jepang, Maksud dan sejarah masuknya Belanda dan Jepang Ke Indonesia | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 4 | Selasa, 12 Maret 2024 | 10:01 | 11.40 | B4.A | Dimulai | Kebijakan Pemerintah Belanda Terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama dan (Theori Receptio in complexu dan Theori Receptie) | Dasar Hukum dan wewenang PA Pada masa Belanda dan Jepang, Implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Pada masa Orde Lama, Kedudukan PA pada masa Awal Kemerdekaan, Dasar Hukum Dan Wewenang PA, Penataan PA pada masa orde lama, Pengadilan Agama pada masa Orde Baru, Penataan PA pada masa Orde Baru, Dasar Hukum Dan Wewenang PA | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 5 | Selasa, 19 Maret 2024 | 10.01 | 10.40 | B4.D | Dimulai | Lanjutan : Kebijakan Pemerintah Belanda terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia (Theorie Receptio in complexu and Theorie Receptie) | Dasar Hukum dan wewenang PA Pada masa Belanda dan Jepang, Implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Pada masa Orde Lama, Kedudukan PA pada masa Awal Kemerdekaan, Dasar Hukum Dan Wewenang PA, Penataan PA pada masa orde lama, Pengadilan Agama pada masa Orde Baru, Penataan PA pada masa Orde Baru, Dasar Hukum Dan Wewenang PA. | (23 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 6 | Selasa, 26 Maret 2024 | 10:03 | 10:40 | B4.D | Dimulai | i Lanjutan : Kebijakan Pemerintah Belanda terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia (Theorie Receptio in complexu and Theorie Receptie) | Dasar Hukum Dan Wewenang PA Pada masa pemerintah Belanda dan Jepang, Implikasi Kebijakan Pemerintah Belanda Terhadap Pengadilan Agama, Pengadilan Agama pada masa Orde Lama, Kedudukan PA pada masa awal Kemerdekaan, DasarHukum dan Wewenang PA, Penataan PA pada masa Orde Lama, Pengadilan | (23 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------|------|---------|--|---|-----------|----------------|--|
| | | | | | | Agama Pada masa Orde Baru, Dasar Hukum dan Wewenang PA. | | | | |
| 7 | Selasa, 2 April 2024 | 10.01 | 11:40 | B4.D | Dimulai | Kedudukan PA dalam UUD 1945, UU nomor.35 Tahun 1999 dan UU Nomor.4 Tahun 2004 | Eksistensi PA / MS Pasca Penyatuan tapan Ke MA, Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam, MS di NAD sebelum dan sesudah Kemerdekaan, Peralihan Dari PA ke MS, Dasar Hukum Dan Wewenang MS,Susunan dan Hukum Acara MS, Prospek | (0 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 8 | Selasa, 9 April 2024 | 10.01 | 11.40 | B4.D | Dimulai | Kedudukan PA dalam UUD 1945 , UU nomor.35 Tahun 1999 dan UU nomor,4 Tahun 2004 | Eksistensi PA / MS Pasca penyatuatapan ke MA, MS di Nanggroe Aceh Darussalam, MS di NAD sebelum dan sesudah kemerdekaan, Peralihan dari PA ke MS, Dasar Hukum dan Wewenang MS, Susunan dan Hukum acara MS, Prospek Syariah Islam dan MS di NAD, PA/MS sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Kedudukan PA/Ms dalam Per UndangUndangan, PA / MS sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, PA/Ms sebagai Peradilan Khusus. | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Telepon : 0736-51276

JURNAL PERKULIAHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 2023 GENAP

MATA KULIAH : Peradilan Agama di Indonesia
NAMA DOSEN : Dr ROHMADI, MA
KREDIT/SKS : 2 SKS
KELAS : 2A

| TATAP MUKA KE | HARI/TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | STATUS | RENCANA MATERI | REALISASI MATERI | KEHADIRAN MHS | PENGAJAR | TANDA TANGAN |
|---------------|-----------------------|-------|---------|-------|-----------|---|--|---------------|----------------|--------------|
| 9 | Selasa, 23 April 2024 | 10.01 | 11.40 | B4.D | Dimulai | Susunan Organisasi PA/MS dan hubungannya MA dengan Depag (Sebelum dan sesudah Penyatuatapan) | Susunan dan Organisasi PA / MS, PA/MS sebagai pengadilan tingkat Pertama, Hubungan PA/MS dengan MA dan Depag (Sebelum dan ssudah Penyatuatapan), Hakim: Syarat-syarat, tugas dan wewenang serta pengangkatan dan pemberhentiannya, Posisi Hakim dalam lembaga Peradilan (jabatan Fungsional), Syarat-syarat Pengangkatan dan pembentenan Hakim, Tugas dan Peran Hakim Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan, Peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim. | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 10 | Selasa, 30 April 2024 | 10.01 | 11:40 | B4.D | Dimulai | SOAL UAS | HASIL JAWABAN UAS | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 12 | Selasa, 7 Mei 2024 | 10:01 | 11:40 | B4.G | Dimulai | Produk Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah | Putusan PA/MS, Penetapan PA/MS, Pelaksanaan Putusan (Ekskusi) PA/MS, Upaya Hukum Pada badan PA/MS, Pentingnya Upaya Hukum Terhadap Putusan PA/MS, Prosedur, syarat-syarat dan waktu pengajuan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,Putusan Yang dapat diajukan terlebih dahulu. | (23 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 13 | Selasa, 14 Mei 2024 | 10.01 | 11:40 | B4.D | Dimulai | Tata Cara Berperkara pada badan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah. | engertian dan sumber Hukum Formil PA/MS, Bentuk,Isi dan Kelengkapan Gugatan/Permohonan, Proses Penerimaan Pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada PA/MS, | (23 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 11 | Selasa, 21 Mei 2024 | 11:01 | 11:40 | B4.D | Dimulai | Kekuasaan Mutlak dan kekuasaan Relatif PA/MS | Kekuasaan Mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Kekuasaan Relatif PA /MS, Tempat-tempat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah. | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 14 | Selasa, 28 Mei 2024 | 10:01 | 11:40 | B4.D | Terjadwal | Prospek Peradilan Agama Pasca lahirnya UU Nomor.35 Tahun 1999 (Penyatuatapan) dan UU Nomor.4 Tahun 2004 | Kedudukan Dan Eksistensi PA/MS pada Era Reformasi, Peluang dan Tantangan PA/MS, Upaya-upaya Konkrit Menjadikan PA/MS sebagai institusi Terhormat. | (0 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 15 | Selasa, 4 Juni 2024 | 10.01 | 11:40 | B4.D | Terjadwal | Lanjutan : rospek Peradilan Agama Pasca lahirnya UU Nomor.35 Tahun 1999 (Penyatuatapan) dan UU Nomor.4 Tahun 2004 | Kedudukan Dan Eksistensi PA/MS pada Era Reformasi, Peluang dan Tantangan PA/MS, Upaya-upaya Konkrit Menjadikan PA/MS sebagai institusi Terhormat. | (0 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |
| 16 | Selasa, 11 Juni 2024 | 10.01 | 11.40 | B4.D | Dimulai | SOAL UAS | HASIL JAWABAN UAS | (25 / 25) | Dr ROHMADI, MA | |

Dr. MUHAMMAD AZIZ ZAKIRUDDIN, S.H., M.H
NIDN 2023049501



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Telepon : 0736-51276

JURNAL PERKULIAHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 2023 GENAP

MATA KULIAH : Peradilan Agama di Indonesia
NAMA DOSEN : Dr ROHMADI, MA
KREDIT/SKS : 2 SKS
KELAS : 2B

| TATAP MUKA KE | HARI/TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | STATUS | RENCANA MATERI | REALISASI MATERI | KEHADIRAN MHS | PENGAJAR | TANDA TANGAN |
|---------------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|--|--|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Senin, 19 Februari 2024 | 13:00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Di Indonesia | engertian Pengadilan Dan Peradilan,Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Dasar Hukum Pengadilan Agama Di Indonesia. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 2 | Senin, 26 Februari 2024 | 13:00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Cakupan, Metode, Kegunaan Studi Pengadilan Agama: Cakupan Peradilan Agama Di Indonesia | Ckupan Pengadila Agama Di Indonesia, Metode Pengkajian Peradilan Agama Di Indonesia, Kegunaan Studi Peradilan Agama Di Indonesia, Hubungan PA dengan Bidang- bidang Lainnya, Hubungan PA dengan Penerapan Hukum Di Indonesia | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 3 | Senin, 4 Maret 2024 | 13.00 | 14.40 | B4.H | Selesai | Pengadilan Agama sebagai salah satu Pranata Hukum. | Penerapan Hukum Islam Lewat jalur Infra struktur, Penerapan Hukum Islam Leawat Jalur Supra Stuktur, Pengadilan Agama Pada masa Penjajahan Belanda dan Jepang, Maksud dan sejarah masuknya Belanda dan Jepang Ke Indonesia. | (26 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 4 | Senin, 11 Maret 2024 | 13:00 | 14.40 | B4.H | Selesai | Kebijakan Pemerintah Belanda Terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama dan (Theori Receptio in complexu dan Theori Receptie) | Dasar Hukum dan wewenang PA Pada masa Belanda dan Jepang, Implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Pada masa Orde Lama, Kedudukan PA pada masa Awal Kemerdekaan, Dasar Hukum Dan Wewenang PA, Penataan PA pada masa orde lama, Pengadilan Agama pada masa Orde Baru, Penataan PA pada masa Orde Baru, Dasar Hukum Dan Wewenang PA. | (26 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 5 | Senin, 18 Maret 2024 | 13.00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Lanjutan : Kebijakan Pemerintah Belanda terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia (Theorie Receptio in complexu and Theorie Receptie). | Dasar Hukum dan wewenang PA Pada masa Belanda dan Jepang, Implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Pada masa Orde Lama, Kedudukan PA pada masa Awal Kemerdekaan, Dasar Hukum Dan Wewenang PA, Penataan PA pada masa orde lama, Pengadilan Agama pada masa Orde Baru, Penataan PA pada masa Orde Baru, Dasar Hukum Dan Wewenang PA. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 6 | Senin, 25 Maret 2024 | 13.00 | 14.40 | B4.H | Selesai | Kedudukan PA Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Eksistensi PA Setelah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989. | Kedudukan PA Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Eksistensi PA Setelah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Pada Masa Orde Reformasi Penataan PA Pada Masa Reformasi Dasar Hukum dan Wewenang PA. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 7 | Senin, 8 April 2024 | 13.00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Kedudukan PA dalam UUD 1945, UU | ksistensi PA / MS Pasca Penyatuan Ke | (26 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------|------|---|--|--|-----------|----------------|--|
| | | | | | nomor.35 Tahun 1999 dan UU Nomor.4 Tahun 2004 | MA, Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam, MS di NAD sebelum dan sesudah Kemerdekaan, Peralihan Dari PA ke MS, Dasar Hukum Dan Wewenang MS,Susunan dan Hukum Acara MS, Prospek. | | | | |
| 8 | Senin, 15 April 2024 | 13.00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Lanjutan : Kedudukan PA dalam UUD 1945 , UU nomor.35 Tahun 1999 dan UU nomor.4 Tahun 2004 | Eksistensi PA / MS Pasca penyatuatapan ke MA, MS di Nanggroe Aceh Darussalam, MS di NAD sebelum dan sesudah Kemerdekaan, Peralihan dari PA ke MS, Dasar Hukum dan Wewenang MS, Susunan dan Hukum acara MS, Prospek Syariah Islam dan MS di NAD, PA/MS sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman,Kedudukan PA/Ms dalam Per UndangUndangan, PA / MS sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, PA/Ms sebagai Peradilan Khusus. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Telepon : 0736-51276

JURNAL PERKULIAHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 2023 GENAP

MATA KULIAH : Peradilan Agama di Indonesia

NAMA DOSEN : Dr ROHMADI, MA

KREDIT/SKS : 2 SKS

KELAS : 2B

| TATAP MUKA KE | HARI/TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | STATUS | RENCANA MATERI | REALISASI MATERI | KEHADIRAN MHS | PENGAJAR | TANDA TANGAN |
|---------------|----------------------|-------|---------|-------|---------|---|---|---------------|----------------|--------------|
| 9 | Senin, 22 April 2024 | 13.00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Susunan Organisasi PA/MS dan hubungannya MA dengan Depag (Sebelum dan sesudah penyatuatapan) | Susunan dan Organisasi PA / MS, PA/MS sebagai pengadilan tingkat Pertama, Hubungan PA/MS dengan MA dan Depag (Sebelum dan ssudah Penyatuatapan), Hakim: Syarat-syarat, tugas dan wewenang serta sengangkatan dan pemberhentiannya, Posisi Hakim dalam lembaga Peradilan (Jabatan Fungsional), Syarat-syarat Pengangkatan dan pembeheitian Hakim, Tugas dan Peran Hakim Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan, Peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 10 | Senin, 29 April 2024 | 13:00 | 14:40 | B4.H | Selesai | SOAL UAS | HASIL JAWABAN UAS | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 11 | Senin, 6 Mei 2024 | 13.00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Kekuasaan Mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Kekuasaan Relatif PA / MS, Tempat-tempat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah. | Kekuasaan Mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Kekuasaan Relatif PA / MS, Tempat-tempat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 12 | Senin, 13 Mei 2024 | 13:00 | 14.40 | B4.H | Selesai | Produk Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah | Putusan PA/MS, Penetapan PA/MS, Pelaksanaan Putusan (Ekskusi) PA/MS, Upaya Hukum Pada badan PA/MS, Pentingnya Upaya Hukum Terhadap Putusan PA/MS, Prosedur, syarat-syarat dan waktu pengajuan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,Putusan Yang dapat diajukan terlebih dahulu. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 13 | Senin, 20 Mei 2024 | 13:06 | 14.40 | B4.H | Selesai | Produk Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah | Putusan PA/MS, Penetapan PA/MS, Pelaksanaan Putusan (Ekskusi) PA/MS, Upaya Hukum Pada badan PA/MS, Pentingnya Upaya Hukum Terhadap Putusan PA/MS, Prosedur, syarat-syarat dan waktu pengajuan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,Putusan Yang dapat diajukan terlebih dahulu. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 14 | Senin, 27 Mei 2024 | 13.00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Tata Cara Berperkara pada badan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah. | engertian dan sumber Hukum Formil PA/MS, Bentuk,Isi dan Kelengkapan Gugatan/Permohonan, Proses Penerimaan Pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada PA/MS, | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |
| 15 | Senin, 3 Juni 2024 | 13.00 | 14:40 | B4.H | Selesai | Prospek Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 35 Tahun 1999 (Penyatuatapan) & UU Nomor 4 Tahun 2004 : | Kedudukan dan Eksistensi PA/MS Pada Era Reformasi. Peluang dan Tantangan PA/MS. Upaya-Upaya Konkrit Menjadikan PA/MS Sebagai Institusi Terhormat. | (28 / 28) | Dr ROHMADI, MA | |

Bengkulu, 27 Juni 2024

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dr. MUHAMMAD AZIZ ZAKIRUDDIN, S.H., M.H
NIDN 2023049501